
**Pengukuran Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kinerja Keuangan Daerah
Terhadap Indeks Pembangunan Manusia
Di Kabupaten Aceh Timur**

Yulina Astuti¹⁾, Krisniawati²⁾, Muhammad Zulkarnain³⁾, Arfriani Maifizar⁴⁾
Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Pase^{1,2,3)}
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar⁴⁾
Email: yulina.astuti.ya@gmail.com¹⁾, krisniawati2892@gmail.com²⁾
m.zulkarnain28@gmail.com³⁾, arfrianiMaifizar@utu.ac.id⁴⁾

Abstract

The study was conducted with the aim to determine the effect of financial performance consisting of the ratio of independence, efficiency ratio and effectiveness ratio to the Human Development Index. The data used was obtained from the Central Statistics Agency and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Methods of data analysis using multiple linear regression equations, coefficient of determination test (R²) and statistical tests (t test or partial test and F test or simultaneous test). The results showed that 51.7% independence ratio, efficiency ratio and effectiveness ratio influenced the Human Development Index in East Aceh District and 48.3% were influenced by other variables not included in the estimation of this study. Then the independence ratio has a positive but not significant effect on the Human Development Index. The efficiency ratio has a positive but not significant effect on the Human Development Index. The effectiveness ratio has a positive but not significant effect on the Human Development Index. F test results note that simultaneous independence ratios, efficiency ratios and effectiveness ratios have a significant effect on the Human Development Index in East Aceh District.

Keywords: Regional Financial Performance, Human Development Index.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat yang sejahtera secara umum diketahui dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tingkat kualitas secara fisik maupun non fisik. Kesejahteraan melalui Indeks Pembangunan Manusia berupa kualitas secara fisik yaitu dari tingkat kesehatan dengan angka harapan hidup dan Indeks Pembangunan Manusia non fisik berupa rata-rata penduduk yang berpendidikan atau mengikuti belajar di sekolah sehingga dapat mengenal huruf dan dalam istilah statistik yaitu angka melek huruf. Kualitas secara non fisik lainnya yaitu adanya kemampuan ekonomi. Jadi kesejahteraan dari masyarakat dapat dilakukan dengan melihat tingkat Indeks Pembangunan Manusia. Jadi pembangunan tidak semata-mata hanya bangunan akan

tetapi lebih kepada manusia sebagai objek yang harus dibangun dan harus sejahtera sehingga nantinya manusia dapat dijadikan sebagai subyek, dan masyarakat dapat berkontribusi bagi kemajuan suatu daerah tingkat kabupaten kota, provinsi dan kemajuan Negara.

Indek Pembangunan Manusia memiliki peran yang penting untuk mengetahui pembangunan perekonomian, melalui kinerja perekonomian yang berhasil yang ditunjukkan dari peningkatan kesejahteraan (Mukarramah, Yolanda and Zulkarnain, 2019), kemudian karena pembangunan yang baik dapat dijadikan sebagai faktor produksi. Dikatakan sebagai faktor produksi karena adanya pengetahuan melalui pendidikan yang mencukupi dapat menciptakan sumber daya manusia dengan kemampuan yang baik, serta dengan adanya pendidikan, dapat memberi kesempatan bagi mereka yang memiliki pendidikan dan kemampuan untuk pengelolaan peningkatan perekonomian.

Kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan gabungan dari lamanya hidup (kesehatan) artinya semakin sehat masyarakat maka semakin makmur dan semakin mendukung majunya suatu daerah. Kemudian semakin tinggi pendidikan masyarakat maka semakin baik pengetahuan dan semakin makmur masyarakat yang ditandai dengan semakin lama masyarakat mengenyam pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia juga gabungan dari unsur kemakmuran dari segi perekonomian atau semakin tinggi pendapatan yang diperoleh sehingga semakin tinggi kemampuan untuk daya beli. Untuk itu pemerintah baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota dalam memajukan pembangunan perlu meningkatkan kesehatan masyarakatnya, perlu meningkatkan pendidikannya dan perlu memberikan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan.

Perhatian pemerintah untuk pembangunan manusia yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusia adakalanya melalui perencanaan pembangunan dan merealisasikannya sehingga dapat mencapai kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan keuangan daerah maka diharapkan setiap pembangunan yang menjadi harapan dan dibutuhkan masyarakat. Mengelola keuangan daerah yang kurang maksimal akan memberikan dampak negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Kinerja pemerintah suatu daerah menjadi perhatian terutama kinerja keuangan, karena dengan adanya Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang salah satu tujuannya adalah memberikan kesejahteraan masyarakat. Terdapat berbagai alat ukur mengenai kinerja keuangan daerah diantaranya berupa rasio keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah berdasarkan penelitian (Harliyani and Haryadi, 2016) terdiri dari rasi derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah, rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Keserasian Belanja Langsung, sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Zulkarnain, Astuti and Wiriani, 2019) rasio keuangan daerah hanya melakukan perhitungan dari dua rasio yaitu rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio

efektivitas. Sementara penelitian (Batafor, 2011) terdapat pengukuran kinerja berupa rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi.

Kabupaten Aceh Timur sebagai salah satu kabupaten di Aceh berdasarkan data yang diperoleh bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Timur dilihat dari tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf dan tingkat pendapatan riil perkapita, Aceh Timur dengan IPM masih rendah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dan masih berada di posisi ke-18. Sementara Kabupaten Aceh Timur yang cukup luas terus melakukan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian kemampuan keuangan daerah ini dalam membangun juga masih rendah sekali, berdasarkan rasio kemandirian di tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 masih rendah sekali yaitu antara 1,6% sampai dengan 9%, artinya pemerintah kabupaten Aceh Timur masih sangat membutuhkan subsidi dari pemerintah pusat, sementara pendapatan asli daerahnya masih terlalu kecil untuk membiayai pembangunan daerah. Sementara kinerja keuangan berdasarkan tingkat efisiensi di tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 sudah efisien serta kinerja keuangan berdasarkan tingkat efektivitas di tahun 2010-2015 di tahun 2010-2013 belum efektif dan di tahun 2014-2015 sudah efektif.

Berdasarkan data tersebut terdapat permasalahan dimana Indeks Pembangunan Manusia masih rendah, kemudian kinerja keuangan berdasarkan rasio kemandirian, Kabupaten Aceh Timur masih sangat rendah tingkat kemandiriannya hanya kinerja keuangan berdasarkan efisiensi dan efektivitas sudah baik. Untuk itu masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kinerja keuangan berdasarkan rasio kemandirian, efisiensi dan efektivitas terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan berdasarkan rasio kemandirian, efisiensi dan efektivitas terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Timur.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengukuran dengan kesejahteraan dengan IPM dikenalkan oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu *United Nations Development Programme* di tahun 1990. Dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran untuk melihat perbandingan atas harapan untuk hidup, melek huruf dapat membaca dan menjadi standar untuk semua negara di dunia serta adanya kemampuan layak hidup atas perekonomian berupa pendapatan yang dapat memenuhi kehidupan, (Lestari and Fitriyati, 2011). Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS Aceh, 2015) terdapat dua hal esensial atas perubahan Indeks Pembangunan Manusia agar lebih akurat alat ukurnya yaitu angka melek huruf dan Produk Domestik Brut dengan hitungan berupa rata-rata geometrik.

Kinerja keuangan daerah dapat dinyatakan sebagai segala hak serta kewajiban dengan kesesuaian penilaian uang, serta dapat diukur dengan segala satuan lainnya,

seperti dinilai dengan uang, unit barang-barang sebagai harta atau kekayaan dalam masa tertentu atau belum diklaim oleh daerah yang tinggi seperti provinsi atau Negara maupun oleh daerah yang sama sesuai peraturan undang-undang yang diterbitkan dan berlaku, (Halim, 2007). Kinerja keuangan menjadi pengukuran keberhasilan yang dapat dicapai oleh satuan kerja dengan standard yang telah ditetapkan oleh masing-masing daerah. Kinerja keuangan memiliki indikator yaitu *input* yang merupakan ukuran kinerja atas sumber dana, tenaga kerja, teknologi, waktu dan material, kemudian *output* menjadi ukuran kinerja atas produk yang dikeluarkan berupa kesesuaian antara program atau masukan, indikator ketiga *outcome* berupa kinerja atas keberhasilan yang dicapai serta indikator keempat *benefit* yang merupakan ukuran kinerja atas manfaat yang dirasakan penduduk pada satuan kerja, sehingga kinerja keuangan menjadi penting dalam menilai akuntabilitas pelayanan publik, hal ini sesuai dengan pendapat (Mardiasmo, 2002) menyatakan mengukur kinerja keuangan bagi pemerintah di daerah dapat dilakukan dengan perbaikan, pengalokasian sumber daya dan memutuskan serta perwujudan dari pertanggungjawaban publik dan perbaikan komunikasi lembaga. Terdapat pengukuran kinerja keuangan daerah berupa rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas (Halim, 2012). Rasio kemandirian digunakan untuk mengukur kemandirian daerah dalam membelanjai daerahnya, rasio efisiensi untuk mengukur tingkat efisiensi dari biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah. Sementara tingkat efektivitas digunakan untuk mengukur seberapa efektif daerah dalam merealisasikan tingkat anggaran.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu menganalisis Indeks Pembangunan Manusia yang dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah berupa rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Data yang digunakan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Analisis data menggunakan persamaan regresi linier berganda (Sugiyono, 2011).

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dimana:

Y = dependent variabel (Indeks Pembangunan Manusia)

a = konstanta

b₁ = koefisien regresi rasio kemandirian

X₁ = Independent variabel (rasio kemandirian)

b₂ = koefisien regresi rasio efisiensi

X₂ = Independent variabel (rasio efisiensi)

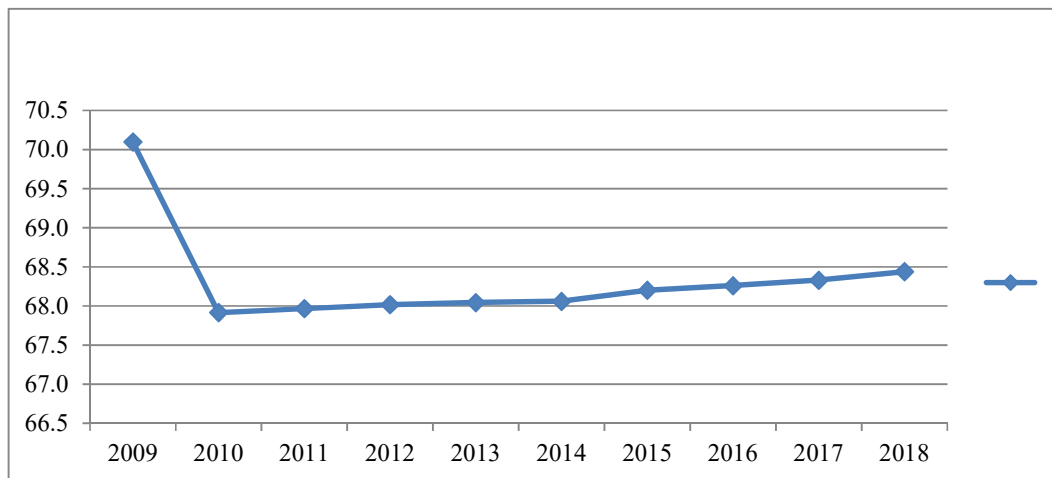
b₃ = koefisien regresi

X_3 = Independent variabel (rasio efektivitas)

Kemudian dilakukan analisis lanjutan berupa koefisien determinasi (R^2) yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana independent variabel dapat menjelaskan dependent variabel. Kemudian dilakukan uji statistik (uji t dan uji F) untuk menguji tingkat signifikan baik secara parsial maupun secara simultan, (Ghozali, 2009).

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 di tahun 2010 mengalami penurunan akan tetapi di tahun berikutnya terjadi peningkatan berkelanjutan. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2009-2018 rata-rata Indeks Pembangunan Manusia adalah sebesar 68,3%, artinya penduduk atau masyarakat di Kabupaten Aceh Timur memiliki angka harapan hidup, melek huruf dan tingkat perekonomian hanya mencapai sebesar 68,3%. Sementara di tahun penelitian tersebut IPM terendah di tahun 2010 sebesar 67,9% dan tertinggi adalah di tahun 2009 sebesar 70,1%. Selengkapnya mengenai indeks pembangunan manusia tahun 2009-2018 dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut.

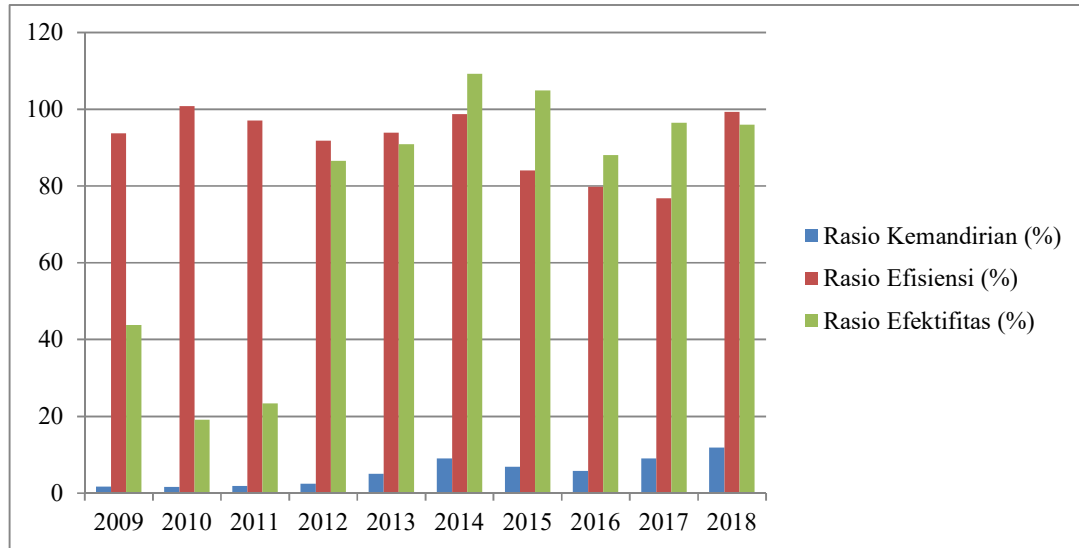


Gambar 4.1 Indeks Pembangunan Manusia (%) tahun 2009-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Temuan dari penelitian untuk kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 berupa rasio kemandirian keuangan daerah dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah atas penerimaan subsidi dari pemerintah pusat, provinsi dan pinjaman. Kemudian rasio efisiensi dapat diketahui dengan perbandingan dari biaya untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya untuk rasio efektivitas dapat diketahui dengan membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan anggaran atau

target Pendapatan Asli Daerah. Kinerja keuangan daerah dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.2. Rasio Kemandirian, Efisiensi dan Efektivitas Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009-2018

Sumber: DJPK Kemenkeu, 2019.

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Aceh Timur tahun 2009 sampai dengan tahun 2018. Tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Aceh Timur masih sangat rendah atau masih berada di kategori 0-25% “rendah sekali” dapat dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur masih sangat membutuhkan dana subsidi dari pemerintah pusat untuk membangun dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Timur. Seiring dengan hasil tersebut dapat dinyatakan kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat di daerah ini masih sangat rendah sekali. Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 rasio kemandirian terendah adalah di tahun 2010 hanya 1,6% sementara 98,4% lainnya adalah subsidi pemerintah pusat, provinsi dan pinjaman daerah.

Grafik 4.2 juga memberikan informasi bahwa tingkat efisiensi tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 secara umum sudah efisien, hanya terdapat satu tahun yaitu tahun 2010 tidak efisien, artinya lebih besar biaya yang dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah hal ini diketahui dari rata-rata sebesar 91,6%, artinya dengan pendapatan Rp 1 maka biaya yang dikeluarkan adalah Rp 0,9. Rasio efisiensi terbaik adalah ditahun 2017 yaitu dengan persentase 76,8% dan tertinggi rasio efisiensi atau tidak efisien yang melebihi 100% di tahun 2010 sebesar 100,8%.

Grafik 4.2. memberikan gambaran bahwa tingkat efektivitas kinerja keuangan di Kabupaten Aceh Timur tahun 2009 sampai dengan tahun 2018. Berdasarkan skala efektif atau tidak efektif, apabila $< 100\%$ maka tidak efektif, sama dengan 100% artinya efektif berimbang dan $> 100\%$ dapat dinyatakan efektif. Hasil hitung menunjukkan hanya di tahun 2014 dan tahun 2015 yang mencapai lebih dari 100% atau dinyatakan efektif atau realisasi lebih besar dibandingkan dengan anggaran atau target yang ditetapkan. Kemudian di tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 masih kurang dari 100% sehingga masih dinyatakan tidak efektif atau masih lebih besar anggaran atau target yang ditetapkan dibandingkan dengan realisasinya. Rasio efektif terendah adalah ditahun 2010 dan rasio efektif tertinggi adalah ditahun 2014.

Berdasarkan data penelitian yang telah di peroleh dan dianalisis maka dapat diketahui secara statistik deskriptif pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif

Keterangan	Rasio Kemandirian (%)	Rasio Efisiensi (%)	Rasio Efektifitas (%)	IPM (%)
Jumlah	55,1	916,0	758,4	607,4
Rata-rata	5,51	91,6	75,84	60,7
Terendah	1,6	76,8	19,1	67,9
Tertinggi	11,8	100,8	109,2	68,4

Sumber: Data sekunder, diolah (2019)

Tabel 4.1 memberikan gambaran mengenai kemandirian keuangan daerah Kabupaten Aceh Timur, tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Aceh Timur, tingkat efektivitas keuangan daerah Kabupaten Aceh Timur dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Timur selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2018. Tingkat kemandirian daerah yang diukur dari pendapatan asli daerah dengan penerimaan subsidi pemerintah pusat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 dengan jumlah $55,1\%$, sementara rata-ratanya hanya sebesar $5,51$ atau dalam pengukurannya termasuk kategori kemandirian masih sangat rendah atau berada di bawah 25% . Diketahui pula tingkat kemandirian terendah di tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar $1,6\%$ serta tingkat kemandirian tertinggi di tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 hanya $11,8\%$. Angka rasio tersebut memberikan gambaran bahwa dari rata-rata, nilai terendah sampai dengan nilai tertinggi belum ada yang mencapai lebih atau sama dengan 25% , sehingga dapat dinyatakan kemandirian masih sangat rendah. Rendahnya tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Aceh Timur di tahun penelitian, menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur masih sangat membutuhkan subsidi dari pemerintah pusat. Apabila hanya mengandalkan

pendapatan asli daerah maka pemerintahan tidak akan dapat berjalan atau tidak dapat membiayai segala urusan daerahnya, terutama belanja pegawai berupa gaji tenaga Aparatur Sipil Negara di daerah dan juga belanja pembangunan daerah berupa pengeluaran untuk kesehatan, pengeluaran untuk pendidikan serta infrastruktur. Terlebih daerah Kabupaten Aceh Timur memiliki wilayah yang luas dan masih terdapat daerah-daerah pedalaman yang perlu dibangun infrastrukturnya (jalan, bangunan dan sosial).

Tingkat efisiensi keuangan daerah dapat diketahui dari biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2009 sampai dengan tahun 2018. Jumlah rasio efisiensi tahun 2009 sampai dengan 2018 adalah 916% dengan rata-rata pertahun adalah sebesar 91,6% dan berdasarkan tingkat efisiensi adalah sangat efisien. Hal tersebut dikarenakan pendapatan asli daerah lebih besar bila dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya. Diketahui pula tingkat efisiensi terendah antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 76,8% dan tertinggi efisiensi adalah sebesar 100,8%. Dengan demikian berdasarkan tingkat efisiensi tertinggi adalah sebesar 100,8% yang menunjukkan perolehan ini yang tidak efisien, karena lebih besar biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan perolehan pendapatan asli daerah. Tidak efisiennya hanya terjadi di tahun 2010.

Tabel 4.1 juga memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan daerah berdasarkan tingkat efektivitas dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018. Tingkat efektivitas keuangan daerah di ketahui berdasarkan realisasi pendapatan asli daerah dibandingkan dengan anggaran pendapatan asli daerah. Tingkat efektivitas dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 jumlahnya adalah sebesar 758,4% atau rata-rata adalah sebesar 75,84% dan berdasarkan hasil ini maka tingkat efektivitas belum efektif atau masih berada dibawah 100%. Hal tersebut maka dapat diketahui bahwa anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur masih terlalu besar bila dibandingkan dengan realisasinya. Tidak efektif juga memberikan gambaran bahwa kinerja masih belum maksimal dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan. Sementara untuk nilai terendah tingkat efektivitas adalah sebesar 19,1% dan tertinggi tingkat efektivitas adalah sebesar 109,2%. Nilai tertinggi ini menggambarkan bahwa masih ada yang efektif antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 yaitu di tahun 2014 dan tahun 2015.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 secara umum meningkat dari tahun ke tahun. Indeks Pembangunan Manusia tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 dengan jumlah 683,3% atau bila dirata-ratakan adalah sebesar 68,3%. Tingkat Indeks Pembangunan Manusia terendah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar 67,9%, sementara tertinggi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Timur adalah 68,4%. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh

Timur dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018, berdasarkan Badan Pusat Statistik berdasarkan rilis data, membuktikan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Aceh Timur, untuk mensejahterakan masyarakatnya. Indeks Pembangunan Manusia juga memberikan gambaran bahwa terjadi peningkatan harapan hidup bagi masyarakat atau tingkat kesehatan yang semakin terjamin, yang dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pembangunan infrastruktur kesehatan yang semakin banyak dan merata disetiap daerah. Demikian halnya untuk tingkat pendidikan, terdapat terus peningkatan infrastruktur sekolah sehingga masyarakat dapat bersekolah atau mengenyam pendidikan terutama sesuai dengan acuan dari pemerintah yaitu pendidikan sampai dengan 9 tahun, serta bila perlu melebihi pendidikan dasar 9 tahun. Dengan adanya penambahan sarana pendidikan sampai dengan ke daerah pedalaman di Kabupaten Aceh Timur diharapkan dapat meningkatkan pendidikan masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk perbaikan perekonomian melalui pemenuhan kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran perkapita juga meningkat sesuai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Timur.

Hasil perhitungan berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel terikat dan kinerja keuangan sebagai variabel bebas (variabel bebas pertama rasio kemandirian keuangan daerah, variabel bebas kedua rasio efisiensi dan variabel bebas ketiga rasio efektivitas) tahun 2009 sampai dengan tahun 2018, dilakukan analisis data dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan (rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi dan rasio efektivitas) terhadap Indeks Pembangunan Manusia, uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel kinerja keuangan (rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi dan rasio efektivitas) dapat menjelaskan variabel terikatnya Indeks Pembangunan Manusia. Sementara uji statistik (uji t dan uji F) untuk mengetahui pengaruh tingkat signifikansi dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil hitung dengan SPSS sebagai berikut.

Tabel 4.2 Hasil Analisis Data

Variabel	B	t – hitung	t – signifikan
Konstanta	56,300	2,090	0,416
R_kemandirian	0,001	0,631	0,999
R_efisiensi	0,221	0,243	0,737
R_efektivitas	0,326	1,340	0,228
R^2 (<i>R Squared</i>)	0,517	Predictors: (Constan), R_kemandirian (X_1), R_efisiensi (X_2) dan R_efektivitas (X_3)	
F hitung	4,143	Dependent Variabel: kinerja keuangan (Y)	
F sig	0,010		

Sumber: Data sekunder, diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui hasil hitung untuk persamaan regresi linier berganda $Y = 56,300 + 0,001X_1 + 0,221X_2 + 0,326X_3$, dapat dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia bernilai positif sebesar 56,300 pada saat kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efisiensi dan rasio efektivitas bernilai konstan. Sementara rasio kemandirian bernilai positif sebesar 0,001 dan bila rasio kemandirian meningkat satu satuan maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Timur sebesar 0,001 satuan dan variabel rasio efisiensi serta rasio efektivitas bernilai tetap. Rasio efisiensi bernilai positif sebesar 0,221 dan bila rasio efisiensi meningkat satu satuan maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Timur sebesar 0,221 satuan dan variabel rasio kemandirian serta rasio efektivitas bernilai tetap. Rasio efektivitas bernilai positif sebesar 0,326 dan bila rasio efektivitas meningkat satu satuan maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Timur sebesar 0,326 satuan dan variabel rasio kemandirian dan rasio efisiensi bernilai tetap.

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) diperoleh sebesar 0,517 atau sebesar 51,7% variabel kinerja keuangan berupa rasio kemandirian keuangan, rasio efisiensi dan rasio efektivitas dapat menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Timur dan sebesar 48,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam estimasi penelitian.

Hasil uji statistik, uji secara parsial (uji t) pada variabel rasio kemandirian diperoleh $t \text{ sig} > \alpha 5\%$ ($0,999 > 0,05$) dan dapat dinyatakan rasio kemandirian berpengaruh tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Timur. Tidak signifikan dikarenakan nilai rasio kemandirian keuangan masih sangat terlalu rendah sehingga belum dapat memberikan pengaruh yang nyata terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Timur. Pada variabel rasio efisiensi diperoleh $t \text{ sig} > \alpha 5\%$ ($0,737 > 0,05$) dan dapat dinyatakan rasio efisiensi berpengaruh tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Timur. Tidak signifikan dikarenakan nilai efisiensi juga berkaitan dengan pendapatan asli daerah yang mana nilai perolehannya juga masih terlalu kecil. Pada variabel rasio efektivitas diperoleh $t \text{ sig} > \alpha 5\%$ ($0,228 > 0,05$) dan dapat dinyatakan rasio efektivitas berpengaruh tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Timur. Tidak signifikan dikarenakan nilai efektivitas juga berkaitan dengan pendapatan asli daerah yang mana nilai perolehannya juga masih terlalu kecil.

5. PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian yaitu kesejahteraan Masyarakat melalui kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efisiensi dan rasio efektivitas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Timur. Sementara saran yang dapat disampaikan, untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Timur perlu terus meningkatkan Indeks Pembangunan manusia. Peningkatan

Indeks Pembangunan Manusia dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kinerja keuangan terutama kemandirian keuangan daerah yaitu dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan setiap potensi daerah di Kabupaten Aceh Timur.

6. DAFTAR PUSTAKA

Batafor, G. G. (2011) *Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata-Provinsi NTT*. Udayana.

BPS Aceh (2015) *Indeks Pembangunan Manusia*.

Ghozali, Ii. (2009) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi Kedua*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, A. (2007) *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Halim, A. (2012) *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YKPN.

Harliyani, E. M. and Haryadi (2016) 'Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi', *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 3(3), pp. 129–140.

Lestari, P. and Fitriyati, D. (2011) 'Pengaruh Belanja Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi', *Jurnal Unesa*. doi: Universitas Negeri Semarang.

Mardiasmo (2002) *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Mukarramah, Yolanda, C. and Zulkarnain, M. (2019) 'Analisis Pengaruh Belanja Modal dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur', *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(2), pp. 105–117. doi: <https://doi.org/10.0123/jse.v3i2.1885>.

Sugiyono (2011) *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Zulkarnain, M., Astuti, Y. and Wiriani, E. (2019) 'Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota Langsa', *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), pp. 65–73.